



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6130-6151

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Prinsip *Good Governance*, *Proactive Fraud Audit* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Dwi Nita Handayani^{1✉}, Eva Herianti², Andry Priharta³

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: dwinitahandayani.dnh@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh prinsip *good governance*, *proactive fraud audit*, *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah/BOS (Studi Empiris Pada SMP Negeri di Kabupaten Kudus). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan alat survey kuesioner. Instrumen data yang digunakan dalam bentuk angket kuesioner dengan pengukuran model skala likert. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan program SmartPLS versi 4. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 26 sekolah SMP Negeri di Kabupaten Kudus dan pemilihan respondenya dengan klasifikasi yaitu guru yang menjadi tim BOS Sekolah di SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan sebanyak 86 orang responden melalui teknik random sampling. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa Prinsip *good governance* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. *Proactive fraud audit* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. *Whistleblowing System* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.

Kata Kunci: *Prinsip Good Governance*, *Proactive Fraud Audit*, *Whistleblowing System*, *Pencegahan Fraud*.

Abstract

The purpose of this study was to determine whether there is any effect of the principles of good governance, proactive fraud audits, and a whistleblowing system on fraud prevention in the management of school operational assistance/BOS (Empirical Study at State Junior High Schools in Kudus Regency). This research is a quantitative descriptive study using a questionnaire survey tool. The data instrument used was in the form of a questionnaire with a Likert scale measurement model. The data analysis technique used was the Partial Least Squares (PLS) method using the SmartPLS version 4 program. The total population used was 26 public junior high schools in Kudus district and the selection of respondents was classified as teachers who were members of the school BOS team at public junior high schools in Kudus district. The sample used was 86 respondents through random sampling technique. The results of hypothesis testing revealed that the principles of good governance proved to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance. Proactive fraud audits have proven to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance. The Whistleblowing System is proven to have a positive and significant effect on fraud prevention in the management of School Operational Assistance.

Keywords: *Principles of Good Governance, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System, Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

Fraud adalah momok global yang dapat merusak reputasi pemerintah. Di Indonesia, kasus *fraud* masih sering terjadi. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menunjukkan setiap tahun, 5% pendapatan organisasi di Indonesia menjadi korban penipuan. *Fraud* paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, diikuti dengan penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan laporan keuangan. Hasil survei ACFE Indonesia menunjukkan, organisasi/lembaga yang paling dirugikan adalah pemerintah (Survei Fraud Indonesia, 2020); (Puryati & Febriani, 2020); (Mamahit & Urumsah, 2018) khususnya sektor publik.

Jumlah penipuan di Indonesia terus meningkat di berbagai sektor, termasuk salah satunya departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan mestinya menjadi tempat yang bersih dari *fraud* dan korupsi. Namun, nyatanya masih banyak ditemukan tindak korupsi disektor pendidikan. Salah satu objek rawan korupsi dibidang pendidikan adalah dana BOS. Pengelolaan dana pendidikan di lingkungan sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar, karena masih menimbulkan permasalahan (konflik) terkait penyelenggaraan pendidikan di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan pemerintah (Erstiawan, 2021).

Berdasar peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal tanpa dipungut biaya, dan wajib belajar menjadi tanggung jawab organisasi pendidikan nasional. Instansi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Program BOS dimulai sejak juli 2005 yang menyerap anggaran cukup besar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, BOS bertujuan mengurangi beban pembiayaan pendidikan masyarakat dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Masalah yang sering terjadi adalah penyelewengan dana BOS. Permasalahan ini terjadi karena tidak adanya pertanggungjawaban antara ucapan dan pelaksanaannya yang tidak sesuai fakta sebenarnya, hal ini disebabkan belum maksimalnya pencegahan *fraud* (Edy et al., 2022). Seluruh lapisan masyarakat berharap Pemerintah serius memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan harapan terwujud pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Trisnawati, 2019).

Terjadinya penyimpangan dana BOS seperti Pemerasan, penyipuan, dan ketidakpatuhan terhadap petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, pemerintah berupaya mencegah tindak kecurangan dengan memanfaatkan sistem baru dalam penyaluran dana BOS sebagai upaya menghindari kecurangan dalam penataan dana BOS. Uang BOS tidak lagi langsung dipindahkan dari Kas Negara ke rekening sekolah, melainkan ke kas APBD, selanjutnya disalurkan ke rekening sekolah. Hal ini relevan dengan teori agency yang menyatakan hubungan atau interaksi antara prinsipal dan agen. Menurut Kementerian Pendidikan, pendekatan baru ini dirancang agar pemerintah daerah dapat lebih mengontrol alokasi dana BOS. Diharapkan dengan cara ini, manajemen akan lebih cepat, dalam jumlah yang tepat, dan tidak akan ada penipuan (Melati et al., 2022). Berikut disajikan alokasi dana BOS Nasional mulai tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 1 Alokasi anggaran dana BOS Nasional dari tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran Dana BOS (Dalam Triliun Rupiah)
1.	2018	46,69
2.	2019	47,4
3.	2020	54,32
4.	2021	52, 5
5.	2022	53, 91

Sumber: Kemenkeu 2022

Dilihat dari alokasi anggaran dana BOS rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap Pendidikan di Indonesia, namun faktanya

kasus korupsi dilingkungan Pendidikan masih marak terjadi. Ada beberapa masalah/curangan terkait penanganan dana Bantuan Operasional Sekolah sejak awal program tersebut. Hal ini disebabkan beberapa variabel yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal (Damaianti, 2020). Menurut Mohamad Risbiyanto, Direktur Investigasi IV BPKP yang menjadi narasumber webinar Diskusi Online IAI KASP dengan tema Pengelolaan Dana BOS Mendekati Era New Normal yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia (KASP IAI) 29 Juli 2020. Kasus kecurangan alokasi dan penggunaan dana BOS melibatkan banyak pihak, mulai sekolah, dinas pendidikan, hingga kabupaten/kota. Berdasarkan temuan audit BPK, Fraud/kecurangan dalam pengelolaan dana BOS hadir di hampir semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, bahkan pengawasan. Penyalahgunaan uang BOS terjadi pada tahap perencanaan berupa perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, persekongkolan untuk memenuhi persyaratan penerima BOS, suap, dan gratifikasi untuk pengajuan BOS. Pada tahap implementasi, ditemukan kecurangan berupa pihak-pihak tertentu yang ditunjuk sebagai pemasok, gratifikasi dalam proses pengadaan, inflasi/penggelembungan harga, kegiatan palsu, dan penggunaan uang BOS untuk keuntungan pribadi (Damaianti, 2020). Berikut data korupsi dana BOS yang ditindak aparat penegak hukum mulai tahun 2016 sampai 2021 berdasarkan instansinya.



Gambar 1. 1 Korupsi Dana BOS yang Ditindak APH 2016-2021 Berdasar Instansi Terjadinya
Sumber: (Sjafrina & Anggraeni P. N, 2021) ICW

Berdasar grafik 1 korupsi dana BOS banyak terjadi dilingkungan disekolah. Melihat dari tahun ke tahun, diketahui bahwa korupsi di sektor pendidikan terus berlanjut selama Covid-19. Empat dari 12 kasus korupsi pendidikan dari 2020-2021 terkait penanganan Covid-19. Dari 240 kasus korupsi, sebagian besar melibatkan penggunaan dana BOS, atau 52 kasus/21,7% dari total kasus. Meskipun ada perubahan skema alokasi pendanaan sejak tahun 2020, korupsi dalam pendanaan BOS tetap ada, dengan transfer langsung ke rekening sekolah dari pos-pos yang sebelumnya ditransfer Departemen Keuangan ke

Rekening Kas Umum Daerah. Korupsi dana BOS jelas tidak hanya terjadi di sekolah dan dinas pendidikan. Pada Juli 2020, dunia pendidikan dihebohkan ketika 64 kepala sekolah Indragiri Hulu mengundurkan diri setelah diperas personel Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Orang-orang itu memanggil kepala sekolah terkait dana BOS tanpa panggilan resmi dan dimintai sejumlah uang. Apabila permintaan tersebut dituruti, pasti dananya berasal dari anggaran sekolah dan berujung pada korupsi dana BOS dalam bentuk lain (Sjafrina & Anggraeni P. N, 2021) ICW.

Tabel 1. 2 Data kasus korupsi pendidikan ditindak aparat penegak hukum 2016-September 2021, berasal dari pihak sekolah.

No	Latar Belakang Pekerjaan	Jumlah Kasus
1.	Kepala dan Wakil Kepala Sekolah	91 Kasus
2.	Guru, Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab teknis kegiatan	36 Kasus
3.	Staf Keuangan/Bendahara Sekolah	31 Kasus

Sumber: (Sjafrina & Anggraeni P. N, 2021) ICW

Sekolah menengah pertama di kudas banyak melakukan kesalahan dalam administrasinya, dibuktikan dengan Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, memanggil sejumlah kepala sekolah SMP di Kabupaten Kudus, terkait penggunaan Bantuan Operasional Sekolah yang diduga permasalahan administrasi, sejumlah sekolah harus mengembalikan kelebihan penggunaan dana BOS kekas daerah atau negara. Dari hasil pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut, kesalahan ditemukan pada pelanggaran administrasi yang di khawatirkan berujung *fraud* bahkan korupsi (<http://isknews.com>). Beberapa SMP Negeri di Kabupaten Kudus ikut dipanggil pemkot Kudus karena banyak melakukan kesalahan administrasi, padahal SMP Negeri merupakan sekolahan favorit calon siswa serta orang tua siswa dalam memilih sekolah. Alasan inilah yang mendasari peneliti berfokus pada SMP Negeri di Kabupaten Kudus.

Mengingat tingginya jumlah *fraud* pada dana BOS, diperlukan tindakan pencegahan *fraud* karena pencegahan merupakan tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi *fraud*. Menurut (Puryati & Febriani, 2020); (Edy et al., 2022); (Maulida & Bayunitri, 2021) cara paling efektif mencegah terjadinya fraud adalah menggunakan "*Fraud Triangle Theory*" terdiri tiga penyebab utama terjadinya fraud yaitu adanya peluang (*opportunity*), adanya tekanan untuk melakukan kecurangan (*Pressure*), dan pelaku penipuan menggunakan beberapa pembenaran untuk melakukan penipuan (*rasionalisasi*).

Tindakan pencegahan penipuan diperlukan untuk memcegah penyalahgunaan dana BOS, salah satunya dilakukan dengan menerapkan prinsip *good governance* (*Transparansi*,

Akuntabilitas, responsibilitas, Independensi, dan Fairness) berdasar KNKG (2008) dapat mencegah seseorang/kelompok dalam organisasi melakukan *fraud* (Inawati & Sabila, 2021). Prinsip *good governance* diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan di organisasi sektor publik. Prinsip *good governance* adalah kode etik dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi melakukan kejahatan (Kurniawan & Izzaty, 2019).

Penelitian *good governance* dalam pencegahan *fraud* dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021) bahwa *government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, Prinsip *good governance* sebagai indikator tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan budaya kepatuhan organisasi, sehingga mencegah lembaga melakukan kecurangan. Penelitian (Saputra et al., 2020) menunjukkan bahwa indikator transparansi dan akuntabilitas dari prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, keduanya memiliki posisi sangat strategis dalam mengungkap kecurangan keuangan. Penelitian (Edy et al., 2022) menyatakan *good school governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, *good school governance* yang semakin baik akan diikuti semakin tinggi pula pencegahan *fraud* yang terjadi. Berbeda dengan penelitian (Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Upaya lain yang dilakukan untuk pencegahan kecurangan adalah dengan *proactive fraud audit*. Tuanakotta (2012) dalam (Anantawikrama et al., 2019) menyatakan bahwa *proactive fraud audit* ini dirancang untuk mengidentifikasi kemungkinan atau risiko penipuan. Sehingga perlu dilakukan dalam Mengawasi kelancaran pengelolaan dana bos. Penelitian terkait *proactive fraud audit* dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh (Anantawikrama et al., 2019), (Saputra et al., 2020) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, Sekolah merasa lebih nyaman mengelola keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan sekolah. Pengawasan proaktif dimaksudkan agar pemangku kepentingan bersama-sama memantau penggunaan dana bantuan pendidikan. Dana tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Mengadakan pertemuan atau diskusi bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun program dan anggaran operasional, mengawasi pelaksanaannya dengan membentuk tim pengawas independen dalam penggunaan hibah, dan secara teratur memeriksa pekerjaan atau program di lingkungan sekolah dapat menjadi contoh pengawasan proaktif, dalam bentuk laporan dan manifestasi fisik, serta aktualisasinya. Berbeda dengan penelitian (Edy et al., 2022) menyatakan bahwa *proactive fraud audit* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, jika *Proactive Fraud Audit* meningkat, pencegahan penipuan akan menurun. Artinya jika proses *proactive fraud audit* semakin baik maka mengurangi segala upaya mencegah kecurangan, bahkan meningkatkan kecurangan.

Selain prinsip *good governance* dan *proactive fraud audit*, upaya yang dilakukan adalah menerapkan *whistleblowing system*. Beberapa peneliti menyatakan *whistleblowing* merupakan faktor yang membantu efektivitas audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan (Mamahit & Urumsah, 2018). Hasil penelitian (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020) Menunjukkan Terungkapnya *fraud* mayoritas berasal dari karyawan/institusi itu sendiri. Hasil tersebut konsisten dengan temuan SFI 2016 dan Report to The National 2018 menyebutkan sumber utama ditemukannya *fraud* berasal dari laporan karyawan perusahann/institusi itu sendiri. Penelitian terkait *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan (Damaianti, 2020) *Whistleblowing system* berpengaruh pada pencegahan penyelewengan dana bantuan operasional. Semakin sukses pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran, semakin besar kemungkinan uang BOS disalahgunakan. Penerapan *whistleblowing system* yang baik, harus memiliki perlindungan terhadap *whistleblower* untuk menghindari perilaku yang merugikan pelapor, sehingga pelapor merasa aman. Berbeda dengan penelitian (Anantawikrama et al., 2019) *whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dikarenakan lebih saling mempercayai, menghargai serta tidak saling menuduh.

Berdasar permasalahan yang terjadi, penulis ingin meneliti pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan menerapkan prinsip *good governance, proactive fraud audit, dan whistleblowing system*. Peneliti ingin tahu tentang dampak prinsip *good governance, proactive fraud audit, dan whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah (Studi Empiris Pada SMP Negeri di Kabupaten Kudus).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena data diperoleh berupa numerik dari kuisisioner yang disebarakan peneliti. (Susanti, 2020) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif mengacu pada data penelitian dalam bentuk numerik, analisis menggunakan statistik. Pengumpulan data penelitian menyebar kuisisioner kepada responden. Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu 26 sekolah SMP Negeri di Kabupaten Kudus dan pemilihan respondenya dengan klasifikasi yaitu guru yang menjadi tim BOS Sekolah di SMP Negeri di Kabupaten Kudus yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara BOS dan komite sekolah Teknik pengambilan sampel melalui teknik random sampling dengan undian. Teknik ini digunakan karena pengambilan sampelnya secara acak sehingga setiap kasus dalam populasi sama-sama memiliki kesempatan dipilih sebagai sampel dengan metode slovin sebanyak 86 tim BOS

sekolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan pertanyaan ialah menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan program SmartPLS versi 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Outer Model

a. Validitas Convergent (*convergent validity*)

Pengujian Validitas Convergent terdapat 2 tahap untuk melakukan evaluasi, yaitu nilai *loading factor* dan nilai AVE. Tahap evaluasi pengukuran Validitas Convergent bertujuan mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya.

1) Loading Factor (*outer loading*)

Tahap pengujian Loading Factor yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan antara indikator dengan variabel laten memiliki hubungan yang kuat. Nilai loading factor > 0.70 untuk *confirmatory research*, sedangkan $> 0,60$ untuk *exploratory research* (Duryadi, 2021). Hasil output analisis evaluasi ini dapat dikatakan semua indikator bersifat valid dan dapat mengukur variabel yang dibentuknya.

Tabel 3.1 Nilai *Loading Factor*

Variabel	Indikator	Loading Factor		Rule of thumb	Keterangan
Prinsip <i>Good Governance</i> (X1)	PGG01	0,821	>	0,60	Valid
	PGG02	0,933	>	0,60	Valid
	PGG03	0,755	>	0,60	Valid
	PGG04	0,745	>	0,60	Valid
	PGG05	0,887	>	0,60	Valid
	PGG06	0,962	>	0,60	Valid
	PGG07	0,745	>	0,60	Valid
	PGG08	0,770	>	0,60	Valid
	PGG09	0,886	>	0,60	Valid
	PGG10	0,910	>	0,60	Valid
	PGG11	0,797	>	0,60	Valid
	PGG12	0,857	>	0,60	Valid
	PGG13	0,729	>	0,60	Valid
	PGG14	0,886	>	0,60	Valid
<i>Proactive Fraud</i>	PFA01	0,910	>	0,60	Valid

Variabel	Indikator	Loading Factor		Rule of thumb	Keterangan
<i>Audit (X2)</i>	PFA02	0,886	>	0,60	Valid
	PFA03	0,738	>	0,60	Valid
	PFA04	0,903	>	0,60	Valid
	PFA05	0,892	>	0,60	Valid
	PFA06	0,845	>	0,60	Valid
	PFA07	0,814	>	0,60	Valid
	PFA08	0,751	>	0,60	Valid
	PFA09	0,830	>	0,60	Valid
	PFA10	0,871	>	0,60	Valid
	PFA11	0,828	>	0,60	Valid
	PFA12	0,758	>	0,60	Valid
	<i>Whistleblowing System (X3)</i>	WS01	0.826	>	0,60
WS02		0.759	>	0,60	Valid
WS03		0.869	>	0,60	Valid
WS04		0.775	>	0,60	Valid
WS05		0.852	>	0,60	Valid
WS06		0.762	>	0,60	Valid
WS07		0.795	>	0,60	Valid
WS08		0.830	>	0,60	Valid
WS09		0.785	>	0,60	Valid
WS10		0.832	>	0,60	Valid
WS11		0.824	>	0,60	Valid
WS12		0.798	>	0,60	Valid
WS13		0.782	>	0,60	Valid
WS14		0.746	>	0,60	Valid
WS15		0.780	>	0,60	Valid
WS16		0.813	>	0,60	Valid
WS17		0.774	>	0,60	Valid
<i>Pencegahan Fraud (Y)</i>	PF01	0.814	>	0,60	Valid
	PF02	0.811	>	0,60	Valid
	PF03	0.902	>	0,60	Valid
	PF04	0.783	>	0,60	Valid
	PF05	0.853	>	0,60	Valid
	PF06	0.771	>	0,60	Valid
	PF07	0.752	>	0,60	Valid

Variabel	Indikator	Loading Factor		Rule of thumb	Keterangan
	PF08	0.799	>	0,60	Valid
	PF09	0.779	>	0,60	Valid
	PF10	0.916	>	0,60	Valid
	PF11	0.887	>	0,60	Valid
	PF12	0.842	>	0,60	Valid
	PF13	0.731	>	0,60	Valid
	PF14	0.751	>	0,60	Valid
	PF15	0.758	>	0,60	Valid
	PF16	0.765	>	0,60	Valid
	PF17	0.924	>	0,60	Valid
	PF18	0.736	>	0,60	Valid

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Pada Tabel 3.1 menunjukkan nilai *loading factor* > 0.60, maka semua indikator dikatakan valid dan tidak ada permasalahan *convergent validity* pada model yang diuji.

2) Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) adalah tahap pengujian selanjutnya yang dilakukan dengan menunjukkan variabel laten dapat memiliki varian indikator yang besar. Semakin besar varian indikator yang terdapat dalam variabel laten, maka semakin besar pula representasi varian indikator dari variabel laten. Dapat dikatakan memenuhi syarat jika nilai AVE yang dihasilkan harus > 0.50 atau 50% dalam evaluasi *Convergent Validity* (Duryadi, 2021).

Tabel 3.2 Nilai AVE

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Precegan Fraud (Y)	0.968	0.971	0.972	0.859
Prinsip Good Governance (X1)	0.967	0.970	0.970	0.703
Proactive Fraud Audit (X2)	0.961	0.963	0.966	0.701
Whistleblowing System (X3)	0.965	0.967	0.968	0.641

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Dilihat dari tabel 3.2 menunjukkan semua variabel valid karena semua konstruk memenuhi syarat validitas konvergen dengan nilai AVE > 0,50.

b. Validitas Discriminant (*discriminant validity*)

Tahap validitas discriminant terdapat 2 tahap evaluasi, yaitu nilai *Cross loading* dan *Fornell-Larcker Criterion*. Tujuan evaluasi ini untuk mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan antara model laten dan variabel lainnya. *Discriminant validity* dapat dilihat juga dari nilai *Heterotrait Monotrait Ratio* (HTMT).

1) *Cross Loading*

Tahap uji *Cross Loading* digunakan dengan membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten dengan indikator variabel laten lainnya. Jika hubungan indikator variabel laten lebih besar daripada hubungan indikator variabel laten lainnya, maka terbukti bahwa indikator variabel laten lebih dapat menentukan ukuran blok dengan baik dari pada variabel laten lainnya (Duryadi, 2021).

Tabel 3.3 Cross Loading

Kode	Pencegahan Fraud (Y)	Prinsip Good Governance (X1)	Proactive Fraud Audit (X2)	Whistleblowing System (X3)
PF01	0.814	0.606	0.657	0.652
PF02	0.811	0.627	0.640	0.553
PF03	0.902	0.538	0.713	0.774
PF04	0.783	0.519	0.628	0.587
PF05	0.853	0.468	0.670	0.721
PF06	0.771	0.687	0.706	0.566
PF07	0.752	0.669	0.625	0.491
PF08	0.799	0.466	0.563	0.547
PF09	0.779	0.474	0.634	0.530
PF10	0.916	0.560	0.712	0.752
PF11	0.887	0.519	0.676	0.705
PF12	0.842	0.670	0.676	0.579
PF13	0.731	0.419	0.590	0.555
PF14	0.751	0.429	0.624	0.643
PF15	0.758	0.416	0.613	0.629
PF16	0.765	0.450	0.610	0.657
PF17	0.924	0.539	0.719	0.738
PF18	0.736	0.513	0.642	0.591
PFA01	0.711	0.596	0.910	0.672
PFA02	0.704	0.542	0.886	0.616
PFA03	0.607	0.482	0.738	0.502
PFA04	0.688	0.568	0.903	0.642

Kode	Pencegahan Fraud (Y)	Prinsip Good Governance (X1)	Proactive Fraud Audit (X2)	Whistleblowing System (X3)
PFA05	0.724	0.523	0.892	0.631
PFA06	0.677	0.481	0.845	0.608
PFA07	0.681	0.498	0.814	0.640
PFA08	0.611	0.449	0.751	0.574
PFA09	0.640	0.532	0.830	0.591
PFA10	0.706	0.603	0.871	0.609
PFA11	0.714	0.580	0.828	0.540
PFA12	0.580	0.308	0.758	0.548
PGG01	0.555	0.821	0.540	0.342
PGG02	0.603	0.933	0.561	0.360
PGG03	0.456	0.755	0.454	0.305
PGG04	0.509	0.745	0.490	0.312
PGG05	0.575	0.887	0.527	0.322
PGG06	0.650	0.962	0.643	0.382
PGG07	0.558	0.745	0.535	0.447
PGG08	0.507	0.770	0.459	0.375
PGG09	0.561	0.886	0.517	0.341
PGG10	0.567	0.918	0.551	0.308
PGG11	0.500	0.797	0.453	0.259
PGG12	0.621	0.857	0.530	0.394
PGG13	0.468	0.729	0.430	0.200
PGG14	0.537	0.886	0.510	0.306
WS01	0.592	0.264	0.535	0.826
WS02	0.603	0.372	0.557	0.759
WS03	0.630	0.298	0.552	0.869
WS04	0.556	0.304	0.551	0.775
WS05	0.733	0.374	0.686	0.852
WS06	0.633	0.373	0.595	0.762
WS07	0.600	0.372	0.714	0.795
WS08	0.625	0.298	0.594	0.830
WS09	0.544	0.252	0.536	0.785
WS10	0.597	0.270	0.526	0.832
WS11	0.676	0.310	0.585	0.824
WS12	0.560	0.264	0.550	0.798
WS13	0.496	0.202	0.496	0.782

Kode	Pencegahan Fraud (Y)	Prinsip Good Governance (X1)	Proactive Fraud Audit (X2)	Whistleblowing System (X3)
WS14	0.605	0.382	0.559	0.746
WS15	0.646	0.330	0.530	0.780
WS16	0.738	0.436	0.629	0.813
WS17	0.635	0.273	0.493	0.774

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Berdasar Tabel 4.5 terlihat bahwa semua nilai korelasi indikator variabel laten memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka dapat dikatakan indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

2) Fornell Larcker Criterion

Pada *Fornell Larcker Criterion* suatu konstruk dinyatakan valid yakni dengan cara membandingkan nilai akar pada AVE (*Fornell Larcker Criterion*) dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar variabel latent (Duryadi, 2021).

Tabel 3.4 *Fornell Larcker Criterion*

	Pencegahan Fraud (Y)	Prinsip Good Governance (X1)	Proactive Fraud Audit (X2)	Whistleblowing System (X3)
Pencegahan Fraud (Y)	0.812			
Prinsip Good Governance (X1)	0.658	0.838		
Proactive Fraud Audit (X2)	0.803	0.617	0.838	
Whistleblowing System (X3)	0.776	0.400	0.715	0.801

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa nilai akar AVE (0,812; 0,838; 0,838 dan 0,801) lebih besar dari korelasi antar variabel laten, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian *Discriminant Validity* telah terpenuhi.

c. Reliabilitas

1) Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk mengukur reliabilitas dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian. Syarat nilai yang harus dihasilkan dari Cronbach's Alpha sebesar > 0.70 (Duryadi, 2021).

Tabel 3.5 Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (rho_c)

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Pencegahan Fraud (Y)	0.959	0.971	0.972	0.659
Prinsip Good Governance (X1)	0.987	0.970	0.970	0.703
Proactive Fraud Audit (X2)	0.951	0.983	0.988	0.701
Whistleblowing System (X3)	0.965	0.967	0.968	0.641

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Tabel 3.5 menunjukkan semua indikator yang digunakan > 0,70 maka tidak terdapat masalah sehingga dapat dinyatakan reliabel.

2) Composite Reliability

Tujuan pengujian *Composite Reliability* adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran nilai reliabilitas dari suatu variabel. Nilai yang dihasilkan dari *Composite Reliability* harus > 0.70 untuk *confirmatory research* dan > 0.60 untuk *exploratory research* (Duryadi, 2021).

Tabel 3.5 menunjukkan nilai *Composite Reliability* yang dihasilkan dari masing-masing variabel > 0.70, maka dapat dikatakan semua variabel telah reliabel.

Analisis Inner Model

a. R square

Tahap pengujian R-Square bertujuan mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Terdapat kriteria nilai R-Square untuk variabel laten dependen (endogen) adalah 0.75 (kuat), 0.50 (sedang), 0.25 (lemah) (Duryadi, 2021). Dalam penelitian ini kriteria R Square adalah kuat yaitu sebesar 0,780.

Tabel 3.6 R square

	R-square	Adjusted R-square
Pencegahan Fraud (Y)	0.780	0.772

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Tabel 3.6 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,780 maka, nilai tersebut menunjukkan 78 % dipengaruhi variabel bebas, kemudian 22 % dipengaruhi oleh variabel lain yang terdapat diluar penelitian atau faktor lain yang tidak diteliti.

b. Predictive *Relevance* (Q-Square)

Tahap *Predictive Relevance* (Q-Square) bertujuan mengetahui pengaruh hubungan model struktural terhadap pengukuran variabel dependen (endogen) dengan prosedur *blindfolding*. Dalam bukunya (Duryadi, 2021), terdapat kriteria nilai *Predictive Relevance* (Q-Square) 0.02, 0.15 dan 0.35 menunjukkan kriteria nilai tersebut dikatakan model lemah, sedang dan kuat. Nilai $Q^2 > 0$ memberikan hasil pengamatan nilai yang baik, namun jika $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa hasil pengamatan tersebut buruk.

Tabel 3.7 Q-Square

Q-Square	
Y	0,496

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Tabel 3.7 menunjukkan hasil pengamatan memberikan nilai yang baik dan model yang kuat yaitu 0,496, dikarenakan nilai $Q^2 > 0$.

1) Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dapat diketahui dengan cara melihat nilai t statistik dan P value. Hipotesis dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai t statistik $> 1,96$ dan nilai P value $< 0,05$. Hal tersebut berbanding terbalik apabila nilai t statistik $< 1,96$ serta P value $> 0,05$ dikatakan hipotesis tidak berpengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh.

Tabel 3.8 Path Coefficient

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O /STDEV)	Nilai P (P values)
Prinsip Good Governance (X1) → Pencegahan Fraud (Y)	0.291	0.283	0.085	3.420	0.001
Proactive Fraud Audit (X2) → Pencegahan Fraud (Y)	0.310	0.302	0.114	2.713	0.007
Whistleblowing System (X3) → Pencegahan Fraud (Y)	0.438	0.454	0.117	3.738	0.000

Sumber: Hasil output SmartPLS 4

Dilihat dari hasil tabel 3.8 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis	Sampel asli (O)	T Statistik	T- Tabel	P Value	Kesimpulan
H ₁ Prinsip <i>good governance</i> berpengaruh positif, signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	0,291	3,420	> 1,96	0,001	Terbukti/ Ha diterima

H ₂	<i>Proactive fraud audit</i>	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	0,310	2,713	>	1,96	0,007	Terbukti/ Ha diterima
H ₃	<i>Whistleblowing System</i>	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	0,438	3,738	>	1,96	0,000	Terbukti/ Ha diterima

Pembahasan

Prinsip *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud artinya jika sekolah menerapkan prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Prinsip good governance berpengaruh sebesar 29,1% terhadap pencegahan Fraud dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri di Kabupaten Kudus, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan sekolah terbuka terhadap publik, melakukan pertanggungjawaban keuangan, tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dikendalikan pihak manapun demi mendapatkan keuntungan serta memperlakukan dengan adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder. Komite sekolah, orang tua siswa, dan semua guru memiliki akses yang sama mengenai penggunaan BOS, mulai dari berapa banyak BOS yang diterima setiap siswa, dan semua pendapatan, pengeluaran sekolah termasuk BOS. Masyarakat dan orang tua siswa berhak mengetahui penggunaan BOS dengan bertanya kepada pihak sekolah guna mewujudkan keadilan serta kesetaraan hak pemangku kepentingan sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong sekolah untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021) bahwa government governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, Prinsip good governance sebagai indikator tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan budaya kepatuhan organisasi, sehingga mencegah lembaga melakukan kecurangan. Penelitian (Saputra et al., 2020) menunjukkan bahwa indikator transparansi dan akuntabilitas dari prinsip good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, keduanya memiliki posisi sangat strategis dalam mengungkap

kecurangan keuangan. Penelitian (Edy et al., 2022) menyatakan good school governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, good school governance yang semakin baik akan diikuti semakin tinggi pula pencegahan fraud yang terjadi.

Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proactive Fraud Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS. Proactive Fraud Audit berpengaruh sebesar 31 % terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri di Kabupaten Kudus, dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Artinya semakin tinggi upaya penerapan Proactive Fraud Audit maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS begitupun sebaliknya semakin rendah upaya penerapan Proactive Fraud Audit maka semakin rendah tingkat pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS.

Minimnya upaya audit sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya fraud dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kecurangan masih sering terjadi. Proactive fraud audit mengarah pada proses audit yang bersifat proaktif dimana auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan guna menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum tindakan audit investigasi dilakukan. Berarti dengan ini sekolah harusnya membentuk tim audit independent dalam penggunaan dana BOS supaya secara rutin dapat memeriksa penggunaan dana BOS.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anantawikrama et al., 2019), (Saputra et al., 2020) bahwa Proactive Fraud Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, Sekolah merasa lebih nyaman mengelola keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan sekolah. Pengawasan proaktif dimaksudkan agar pemangku kepentingan bersama-sama memantau penggunaan dana bantuan pendidikan. Dana tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Mengadakan pertemuan atau diskusi bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun program dan anggaran operasional, mengawasi pelaksanaannya dengan membentuk tim pengawas independen dalam penggunaan dana sekolah, dan secara teratur memeriksa pekerjaan atau program di lingkungan sekolah dapat menjadi contoh pengawasan proaktif, dalam bentuk laporan dan manifestasi fisik, serta aktualisasinya.

Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Whistleblowing System memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS. Whistleblowing System berpengaruh sebesar 43,8 % terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri di Kabupaten Kudus, dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Artinya semakin sukses penerapan Whistleblowing System dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri di Kabupaten Kudus. Penerapan Whistleblowing System harus disertai perlindungan terhadap Whistleblower untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pelapor.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damaianti, 2020) Whistleblowing system berpengaruh pada pencegahan penyelewengan dana bantuan operasional. Semakin sukses pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran, semakin besar pula pencegahan penyalahgunaan dana BOS. Penerapan whistleblowing system yang baik, harus memiliki perlindungan terhadap whistleblower untuk menghindari perilaku yang merugikan pelapor, sehingga pelapor merasa aman.

SIMPULAN

1. Prinsip *good governance* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena prinsip *good governance* memiliki korelasi signifikan terhadap pencegahan *fraud*, baik transparansi, akuntabilitas, *responsibilitas*, *independensi* dan *fairness* dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa prinsip *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. *Proactive fraud* audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena *Proactive fraud audit* memiliki korelasi signifikan terhadap pencegahan *fraud*, semakin tinggi upaya penerapan *Proactive Fraud* Audit maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS begitupun sebaliknya semakin rendah upaya penerapan *Proactive Fraud Audit* maka semakin rendah tingkat pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa *Proactive fraud* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
3. *Whistleblowing System* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena

Whistleblowing System memiliki korelasi signifikan terhadap pencegahan *fraud*, artinya semakin sukses penerapan *Whistleblowing System* dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BOS. Penerapan *Whistleblowing System* harus disertai perlindungan terhadap *Whistleblower* untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pelapor. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantawikrama, Komang, & Daniel. (2019). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII (Issue 3), 201–214. <https://doi.org/10.35808/ersj/1466>
- Arifah, S. (2021). Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sd Yayasan Nurhasanah Medan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. 9(2), 14.
- Asih, S. N., Ruslina, L., & CA, P. I. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi Dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Pada Dinas-Dinas Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat). *Doctoral dissertation*, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). *Survei-Fraud Indonesia 2019*. ACFE Indonesia Chapter.
- Astutik, E. (2022). Analisis Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Sistem Pembelajaran Daring Saat Pandemi Covid-19. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v6i1.24078>
- BPKP. (2019). *Proactive Auditing (Instrumen Pencegahan Fraud)*. Deputi Bidang Investigasi.
- Damaianti, I. (2020). The Influence of Investigative Audit and Whistleblowing System Implementation on The Prevention of Misuse of School Operational Aid Funds (Empirical Study at Jawa Barat BPKP Head Office). *Institute of Computer Science (IOCS)*, 4(3), 10.
- Duryadi. (2021). Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

- Edy, I. C., Marsono, S., & Haryanti, S. S. (2022). Prediction Orientation: The Role of Good School Governance and Internal Control Systems in Moderating the Influence Between Proactive Fraud Audits on Fraud Prevention. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 3(1), 9.
- Erstiawan, M. S. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Theory. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 26(1).
- Halimatussa'diyah. (2021). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Whistleblowing Dan Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi. *unsada*.
- Halimatussa'diyah, H. D. (2021). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Whistleblowing Dan Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi. *Unsada*.
- Imansari, P. F., Halim, A., & Wulandari, R. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. 9.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16>
- Kemdiknas. (2022). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan menteri pendidikan Dan kebudayaan republik Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance. KNKG.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.43>
- Marpaung, N. N. (2022). *Dinamika Kinerja Karyawan PT Adia Mirsi Mindo (AMM) Jakarta; Analisis Pengaruh Motivasi Kerja*. 7(1), 14.
- Maulida, windy yulian, & Bayunitri, bunga indah. (2021). The influence of whistleblowing

- system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Melati, ririn, Agustiawan, & siti rodiah. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS. *Accounting and Management Journal*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378>
- Murisna, Bachri, S., & Patra Ls, A. D. A. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu. 17.
- Nada, A. N., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Wonodadi. 4(10), 9.
- Petrie, E., & Evans, C. (2016). An intelligence led approach to addressing cyber fraud: Proactive fraud auditing. *Journal of Financial Compliance*, 1(1), 8.
- Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(3), 14.
- Saputra, K. A. K., Larasdiputra, G. D., Manurung, D. T. H., & Amani, T. (2020). Preventing Fraudulent Use of Funds Management Operational Support Education. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), 7.
- Sari, W., & Wening, N. (2022). Analisis Kinerja Pelayanan, Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah BRI Kangean. 9.
- Setiawan, R. R. (2016). Pengaruh Penerapan sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan Bumn Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1).
- Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni P. N, D. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. Indonesia Corruption Watch.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Sopiani, V. (2020). Optimalisasi Peran Auditor Internal Melalui Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Instansi Perwakilan BKKBN DIY. *Journal Competency of Business*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.47200/jcob.v4i2.703>
- Survei Fraud Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia Chapter.

- Susanti, H. (2020). Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *REVITALISASI*, 8(1), 74. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.882>
- Trisnawati, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5436>
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. 15.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program RKAS. 13.
- Yusra, M., Yunita, N. A., Nurhasanah, & Arliansyah. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Visioner & Strategis*, 10(1), 79–86.